

JURNAL

**WEWENANG GUBERNUR DALAM MENERBITKAN
SURAT KEPUTUSAN NOMOR 188/113/KPTS/013/2012 TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DAERAH
ANTARA KABUPATEN BLITAR DAN KABUPATEN KEDIRI**
(Studi di Provinsi Jawa Timur)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat – Syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ZANUAR IRVAN

NIM. 0910110091



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2013

**WEWENANG GUBERNUR DALAM MENERBITKAN SURAT
KEPUTUSAN NOMOR 188/113/KPTS/013/2012 TENTANG
PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS DAERAH ANTARA
KABUPATEN BLITAR DAN KABUPATEN KEDIRI**

Zanuar Irvan

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

ABSTRAK

Perbedaan peta batas wilayah yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di sekitar kawasan Gunung Kelud sudah terjadi sejak tahun 2002. Dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dan kabupaten Kediri di sekitar kawasan Gunung kelud pada tanggal 28 Februari 2012 ini semakin memperuncing permasalahan diantara kedua pihak. Dalam proses fasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur untuk mencapai kesepakatan terhadap batas daerah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri belum mencapai kesepakatan yang diinginkan kedua belah pihak, akan tetapi Gubernur Jawa Timur secara serta merta menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dan Kabupaten Kediri di sekitar kawasan Gunung Kelud. Dampak dari terbitnya surat keputusan tersebut Kabupaten Blitar dirugikan dengan hilangnya wilayah administratif Kabupaten Blitar yakni Kecamatan Nglegok, Kecamatan Gandusari, dan Kecamatan Garum. Pada akhirnya Gubernur Jawa Timur menggugat surat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sampai saat ini PTUN sudah mengeluarkan putusan bahwa Surat Keputusan Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah di batalkan.

Kata Kunci: *Wewenang Gubernur, Gunung Kelud, Batas Daerah.*

ABSTRACT

The difference in boundary maps owned by Blitar and Kediri in the surrounding area Kelud has happened since 2002. With the issuance of Decree No. 188/113/KPTS/013/2012 on Dispute Settlement Area Boundary Between Blitar and Kediri district in the area around Mount kelud on February 28, 2012 is

increasingly exacerbate the problems between the two parties. In the process of facilitation by the Governor of East Java, to reach an agreement on border between Blitar and Kediri has not reached the desired agreement of both parties, but the East Java Governor immediately issued East Java Governor Decree No. 188/113/KPTS/013 / 2012 on Regional Boundary Dispute Between Blitar and Kediri district in the area around Mount Kelud. The impact of the issuance of the decree Blitar harmed by the loss of the district administrative Blitar Nglegok, Gandusari District, and District Garum. In the end the Governor of East Java sue letter ruling to the Administrative Court. Until now, the Administrative Court has issued a ruling that Decree No. 188/113/KPTS/013/2012 on Settlement of Disputes Boundary Regional canceled.

Keywords: *Authority Governor, Kelud Mountain, Border Region*

PENDAHULUAN

Gunung Kelud yang memisahkan Kota Blitar dan Kota Kediri membagi wilayah menjadi 2 wilayah yaitu Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri. Sebelah tenggara Gunung Kelud termasuk wilayah Kabupaten Blitar, sedangkan wilayah utara Gunung Kelud termasuk wilayah Kabupaten Kediri.

Mengenai batas wilayah Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di sekitar kawasan Gunung Kelud, Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri memiliki perbedaan peta yang menjelaskan tentang batas daerah di sekitar kawasan Gunung Kelud. Pembahasan tentang sengketa batas daerah sudah dilakukan dua kabupaten tersebut sejak tahun 2002. Bupati Blitar saat itu, Imam Muhadi melakukan pembicaraan dengan Bupati Kediri Sutrisno. Imam Muhadi menyatakan bahwa Gunung Kelud masuk ke dalam wilayah Kabupaten Blitar.

Terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Soekarwo Nomor 188/113/ KPTS/013/ 2012 tertanggal 28 Februari 2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri yang terletak pada kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur yang membuat

permasalahan batas daerah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri semakin meruncing.

Keputusan yang diambil oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo adalah keputusan final. Karena Gunung Kelud masuk wilayah Kediri setelah melalui pertimbangan dengan melihat peta sejak Zaman Belanda serta masukan dari Kementerian Dalam Negeri. Serta dalam membuat keputusan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak berjalan sendiri melainkan mendapat masukan dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun, dalam hal ini Gubernur Jawa Timur dalam mengeluarkan keputusan hanya berdasarkan sumber dari salah satu pihak yaitu Kabupaten Kediri, tanpa mempertimbangkan sumber dari Kabupaten Blitar. Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Timur memastikan bahwa beberapa desa di lereng Gunung Kelud yang sebelumnya masuk wilayah Kabupaten Blitar akan dimasukkan ke Kabupaten Kediri. Kemudian akan ada perubahan administrasi terutama soal Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Akibat dari Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri yang terletak pada kawasan Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur yaitu 3 kecamatan di Kabupaten Blitar masuk ke dalam Kabupaten Kediri yaitu Kecamatan Gandusari, Kecamatan Garum, dan Kecamatan Nglegok. Sampai saat ini sudah ada keputusan final yaitu dengan dibatalkannya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/ KPTS/013/ 2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri yang terletak pada kawasan Gunung Kelud Gubernur Jawa Timur.

RUMUSAN MASALAH

1. Mengapa Gubernur Jawa Timur lebih mempertimbangkan sumber dari Kabupaten Kediri dalam mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/ KPTS/013/ 2012 tertanggal 28 Februari 2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri ?

2. Apa dampak dari terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/ 2012 tertanggal 28 Februari 2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dengan Kabupaten Kediri ?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) dan pendekatan analitis (*analytical-Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) digunakan untuk meneliti Surat Keputusan Gubernur tentang Penyelesaian Permasalahan batas daerah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri dapat dinilai sah apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan Gubernur dalam membuat keputusan tentang batas daerah. Pendekatan analitis (*analytical-approach*) digunakan untuk menganalisis konsep yuridis tentang Kewenangan Gubernur dan syarat sah keputusan sehingga dapat menjawab permasalahan hukum yang ada tercipta kepastian hukum. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lapangan dengan pengkajian Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dan Kabupaten Kediri. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan melalui literatur-literatur yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Sumber data yang peneliti peroleh dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian berasal dari literatur dan skripsi, dan teknik pengamatan. Data yang terkumpul akan disusun dengan cara deskriptif analitis, menjelaskan atau menerangkan segala sesuatu yang diperoleh dari teori maupun hasil penelitian kepustakaan sehingga dapat ditemukan kebenaran yang konkrit dan jelas secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Kronologis Timbulnya Perselisihan Batas Daerah

Sejauh ini Pemerintah Kabupaten Blitar hanya memiliki bukti peta dan pengukuran Bakosurtanal yang menunjukkan Gunung Kelud masuk wilayah Kabupaten Blitar. Sedangkan Kabupaten Kediri memiliki bukti yang lebih *up to date*.

Pemerintah Kabupaten Kediri dalam menjelaskan bukti otentik untuk mempertahankan Gunung kelud yakni dengan menggunakan peta koleksi Arsip Nasional Indonesia tahun 1840 dan Peta Tembaga tahun 1933. Peta buatan pemerintah Belanda itu diyakini sebagai bukti otentik keberadaan puncak Gunung Kelud di wilayah Kediri. Dan menurut Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar tidak memiliki bukti yang memiliki kekuatan hukum melebihi bukti yang dimiliki oleh kabupaten Kediri.

Dalam pertemuan yang digelar di Surabaya, Pemerintah Kabupaten Kediri menunjukan Peta Rupa Bumi (PRB) Indonesia hasil pemetaan tahun 2003 dalam bentuk digital. Sedangkan Pemerintah Kabupaten Blitar tidak mampu menunjukan bukti mengenai batas daerah di kawasan Gunung Kelud dan hanya tetap menunjukkan bukti-bukti lama berupa Peta Topdam V/Brawijaya.

Oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, data yang disuguhkan Pemerintah Kabupaten Kediri dinilai lebih up to date dibanding milik Kabupaten Blitar. Secara politis dan yuridis, posisi Pemerintah Kabupaten Kediri sangat menguntungkan.

Selama ini Pemerintah Kabupaten Blitar selalu mengajukan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) sebagai bukti yang sah dalam perundingan. Dalam peta itu Gunung Kelud termasuk dalam wilayah Kabupaten Blitar. Padahal, peta itu bukan referensi resmi untuk menjelaskan garis wilayah. Peta yang dikeluarkan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsutanal) itu tidak menjelaskan secara rinci tentang batas provinsi, batas kabupaten, sampai batas desa, sehingga tidak bisa dijadikan acuan untuk menyelesaikan permasalahan garis batas antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Blitar dan Kabupaten Malang di sekitar Gunung Kelud.

Bukti lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Blitar berupa peta Topografi Kodam V Brawijaya (Topdam) juga dianggap bukan referensi resmi, sebab peta itu dirancang untuk kepentingan militer, bukan pembangunan. Demikian pula dengan peta Perhutani yang menyebutkan wilayah Gunung Kelud masuk Kabupaten Blitar dinilai tak layak.

Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pemerintah Kabupaten Kediri sama-sama bersikukuh atas kepemilikan Gunung Kelud, dimana Pemerintah Kabupaten Kediri mengklaim kepemilikan Gunung Kelud atas dasar Piagam Jayakarta serta Peta

Bakosurtanal yang telah direvisi pada 2003, sedangkan Pemerintah Kabupaten Blitar hanya berlandaskan Keputusan bukti-bukti lama berupa Peta Bakosurtanal sebelum direvisi serta Peta Topdam V Brawijaya.

Seiring berjalannya waktu perselisihan batas daerah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri yang terletak di kawasan Gunung Kelud terus berlangsung tanpa menghasilkan kesepakatan. Dan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah tersebut dengan melaksanakan rapat – rapat yang melibatkan Tim PPBD Kabupaten Blitar, Tim PPBD Kabupaten Kediri, Kepala Bakorwil Madiun, dan Kepala Bakorwil Malang. Namun, kedua pihak belum menemukan kesepakatan mengenai sumber yang akan digunakan.

Pada Bulan Mei 2010, Bupati Mei 2010, Bupati Blitar, mengirim surat Nomor 100/ 123 /409.011/2010 Ke Menteri Dalam Negeri tentang Permohonan Fasilitas Penyelesaian Sengketa Batas Daerah, mengingat fasilitasi penyelesaian sengketa yang dilakukan Pemerintah Provinsi belum berhasil merumuskan sebuah kesepakatan. Namun Gubernur Jawa Timur telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Antara kabupaten Blitar Dan Kabupaten Kediri. Akibatnya, Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur tersebut telah menimbulkan konflik antar daerah dan berdampak pada terciptanya iklim yang tidak sehat bagi masyarakat di kedua daerah dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Wewenang Gubernur Jawa Timur Dalam Menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/Kpts/013/2012 Tentang Penyelesaian Batas Daerah

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 terdapat pengaturan berkaitan dengan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan sebagaimana tercantum dalam pasal 198 Ayat (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud. Sedangkan dalam Ayat (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

Bahwa UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat *lex Generalis* yang merupakan

pedoman di bidang pemerintahan daerah. Makna “perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan” adalah mencakup pelaksanaan jalannya pemerintahan baik secara organisasi dan kewenangan.

Permendagri No 1 Tahun 2006 merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat *lex specialis* berkaitan dengan penegasan batas daerah, dimana landasan hukum yang dipakai tidak hanya UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647). Selain itu berkaitan dengan penegasan batas daerah berhubungan dengan UU No 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Norma-norma yang ada di dalam Permendagri No 1 tahun 2006 berkaitan dengan norma-norma pengaturan yang lebih spesifik. sifat *lex specialis* tercantum juga dalam Bab V Fasilitas Perselisihan Batas Daerah Pasal 20 ayat 1 yang berisi tentang Penyelesaian perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi difasilitasi oleh Gubernur. Makna *Penyelesaian perselisihan batas antar daerah kabupaten/kota* adalah merupakan bagian pemahaman yang *lex spesialis* dari *perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan*. Dalam Permendagri No 1 Tahun 2006 tidak di temukan kewenangan Gubernur berkaitan dengan wewenang dengan mengeluarkan produk hukum berupa Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang sengketa batas wilayah dengan sifat yang *lex spesialis*, dengan logika hukum demikian gubernur tidak memiliki kewenangan atau *abuse of power*.

Alasan Gubernur Menerbitkan Surat Keputusan

Gubernur memiliki kewenangan dalam menerbitkan surat keputusan penyelesaian perselisihan batas daerah antar kabupaten/kota, sesuai ketentuan Pasal 198 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi. Adanya Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 yang dalam rangka penentuan batas daerah secara pasti di lapangan sesuai dengan amanat undang-undang tentang

pembentukan daerah, perlu dilakukan penegasan batas daerah secara sistematis dan terkoordinasi

Kabupaten Blitar tidak bisa memberikan sumber data yang up to date dalam membuktikan bahwa Gunung kelud ada di kawasan Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar memiliki sumber data akurat yang bias digunakan sebagai landasan hukum penerbitan Surat keputusan Gubernur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar dengan Kabupaten Kediri Yang Terletak Pada Kawasan Gunung Kelud Di Provinsi Jawa Timur.

Dampak Yang Ditimbulkan Dari Terbitnya Surat Keputusan Gubernur

1. Dampak surat keputusan gubernur dilihat dari sudut pandang kabupaten Blitar
 - a. Dampak di bidang sosial dan budaya

Dalam konteks sosial, Gunung Kelud bagi masyarakat Blitar memiliki makna yang sangat berpengaruh terhadap aspek urusan kemasyarakatan maupun tata pemerintahan. Gunung Kelud menjadi simbol sosial pemerintahan Blitar dan pengetahuan masyarakat dalam kehidupan keseharian, termasuk tertanam melalui proses pendidikan formal. Ikatan dengan Gunung Kelud sudah terbangun dalam hati/batin masyarakat di Blitar.

Dalam konteks kemasyarakatan, maka berkah Gunung Kelud bagi masyarakat Blitar secara ekonomi memberikan kesuburan pertanian sebagai sandaran hidup ribuan petani diwilayah sekitar Gunung Kelud, termasuk budidaya perikanan karena melimpahnya air dari sumber dilereng Gunung Kelud, tanaman perkebunan, termasuk sumberdaya ekonomi lainnya misalkan galian C sebagai hasil pasca letusan yang mengalir melalui sungai-sungai yang berhulu di lereng Kelud. Maka, menjadi wajar dan masuk akal bahwa masyarakat Blitar memiliki ikatan yang sangat kuat dengan keberadaan Gunung Kelud.

Dengan adanya surat keputusan gubernur telah mencederai aspek kemasyarakatan dan aspek tata pemerintahan Kabupaten Blitar yang sejak dahulu sudah melekat dalam tatanan sosial Kabupaten Blitar. Selain berpengaruh terhadap aspek kemasyarakatan dan tata pemerintahan

dengan adanya surat keputusan gubernur tersebut bisa mempengaruhi kondisi harmonisasi sosial antar masyarakat Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri di kawasan gunung kelud tersebut yang bisa menimbulkan konflik sosial yang merembet pada konflik fisik antar masyarakat Kabupaten Blitar dan kabupaten Kediri. Keputusan ini telah mencederai ketenangan dan suasana batin masyarakat Blitar.

b. Dampak di bidang ekonomi

Adanya keputusan gubernur mengenai penegasan batas wilayah tersebut mengakibatkan berkurangnya sumber daya ekonomi yang menjadi hak dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Blitar. Dalam hal ini Kabupaten Blitar telah dirugikan dengan adanya surat Keputusan Gubernur tersebut.

c. Dampak di bidang administrasi

Dengan adanya Surat Keputusan Gubernur berpengaruh terhadap wilayah administrative Kabupaten Blitar, yang ditandai dengan berkurangnya wilayah administrative Kabupaten Blitar yaitu:

- 1) Desa Sumberasri Kec. Nglegok
- 2) Desa Karangrejo Kec. Garum
- 3) Desa di kawasan Gunung Gedang di kec. Gandusari

Dampak dari perubahan/pengurangan luas wilayah nantinya akan berpengaruh terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Blitar dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Blitar.

d. Dampak di bidang politik

Dalam bidang politik, adanya keresahan penyelenggara pemerintahan dan masyarakatnya, terganggunya jalannya pembangunan di daerah yang terlanda konflik karena dengan adanya surat keputusan mengenai penegasan batas wilayah mempengaruhi Pemerintah kabupaten Blitar dalam menetapkan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah). Selain itu, terganggunya hubungan bilateral

antar daerah yang terlibat sengketa atau konflik yang dapat meluas melibatkan warga masyarakat di dua daerah berkonflik.

2. Dampak surat keputusan gubernur dilihat dari sudut pandang Kabupaten Kediri

a. Dampak di bidang sosial dan budaya

Dalam konteks sosial, dengan terbitnya surat keputusan gubernur tentang penegasan batas daerah akan mempengaruhi perkembangan sosial disekitar kawasan gunung kelud, berdasarkan surat keputusan tersebut Kediri yang memiliki wewenang untuk mengolah sumber daya alam yang ada di sekitar gunung kelud harus bisa menjaga keharmonisan sosial masyarakat disekitar kawasan Gunung Kelud agar nantinya tidak timbul konflik sosial yang bisa mempengaruhi pemerintahan Kabupaten Kediri sendiri.

Berdasarkan surat keputusan mengenai penegasan daerah tersebut Kabupaten Kediri merasa diuntungkan, namun keuntungan yang dimiliki Kabupaten Kediri ini harus di olah dengan sebaik-baknya.

b. Dampak di bidang ekonomi

Berdasarkan surat keputusan penegasan daerah, Kabupaten Kediri memiliki keuntungan yakni dengan bertambahnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang masuk kedalam Pemerintahan Kediri. Pemerintahan Kabupaten Kediri bisa memaksimalkan potensi sumber daya alam dan potensi wisata yang sangat melimpah disekitar kawasan Gunung Kelud.

c. Dampak di bidang administrasi

Dalam Konteks administrasi terdapat perubahan/ penambahan wilayah kabupaten Kediri. Hal ini berpengaruh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kediri. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kediri nantinya bisa lebih memaksimalkan perkembangan potensi yang ada di wilayah

Kabupaten Kediri khususnya di sekitar kawasan Gunung Kelud dengan sebaik-baiknya.

d. Dampak di bidang politik

Berdasarkan surat keputusan gubernur mengenai penegasan batas wilayah, Kabupaten Kediri selaku pemangku kepentingan akan merasa terancam kepentingan politiknya apabila gagal mempertahankan sumber-sumber yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Maka dengan adanya surat keputusan tersebut Kabupaten Kediri harus mampu mempertahankan dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di sekitar kawasan Gunung Kelud.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Pertimbangan Gubernur Jawa Timur dalam menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 hanya berdasarkan Sumber data dari kabupaten Kediri berupa peta karena pada saat diadakan perundingan penegasan batas daerah antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Kediri yang difasilitasi oleh Gubernur Jawa Timur, Kabupaten Blitar tidak bias menunjukkan sumber data yang terbaru atau up to date.
2. Gubernur melihat sumber data yang dimiliki Kabupaten Blitar sudah kadaluwarsa dan sumber data dari Kabupaten Kediri masih baru dan tentunya memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Blitar.
3. Perubahan batas daerah yang berdampak atas berkurangnya sumber daya ekonomi di Kabupaten Blitar menyangkut batas wilayah, berkurangnya kawasan administrative desa (Desa Sumberasri Kec. Nglegok, Desa Karangrejo Kec. Garum, dan Desa di kawasan Gunung Gedang di kec. Gandusari).
4. Dampak perubahan/pengurangan luas wilayah juga akan mengurangi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), perubahan RUTRW wilayah dan

sebagainya. Termasuk bagi masyarakat di kawasan tersebut, dimana *economics resources* akan menimbulkan kompetisi yang bisa mengarah pada konflik horizontal akibat perubahan tapal batas wilayah.

5. Dari hasil analisis-analisis di atas maka disimpulkan bahwa secara teknis wilayah gunung kelud masuk kedalam wilayah administrasi kabupaten Blitar.

SARAN

1. Pengusutan tuntas terhadap penerbitan RBI BAKORSURTANAL (2003) sebagai upaya reformasi birokrasi dan etika profesi dalam kasus penerbitan peta RBI.
2. Guna menjaga harmonisasi sosial, mengurangi/ meminimalisir eskalasi konflik serta kebersamaan dikalangan masyarakat dan pemerintahan, maka perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk mencapai consensus dengan “kembali ketitik nol” atau *status quo* dengan melibatkan elemen pemangku kepentingan terkait khususnya dengan membatalkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 118/113/KPTS/013/2012.
3. Upaya normalisasi hubungan baik khususnya antara Pemkab Blitar dan Pemkab Kediri yang difasilitasi oleh Pemerintah provinsi Jawa Timur. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari proses rekonsiliasi dan resolusi atas konflik batas daerah di kawasan Gunung Kelud serta memberikan ketenangan melalui sosialisasi bagi masyarakat diwilayah masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

Amrah Muslimin. 1980.*Beberapa azaz-azaz dan pengertian-pengertian pokok tentang Aministrasi dan hukum administrasi*. Bandung.

Atmosudirdjo, Prajudi. 1983.*Hukum Administrasi negara*.Ghalia Indonesia. Jakarta.

Djoko prakoso,S.H. 1988. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Liberty.Yogyakarta.

Indroharto. *Usaha Memahami Undang – Undang Tentang Peradilan tata usaha negara*.

Kuntjoro purbopranoto. 1981. *Perkembangan Hukum Administrasi Indonesia*...Angkasa offset. Bandung.

Lutfi Effendi. 2004. *Pokok-pokok Hukum Administrasi*. Bayu Media. Malang.

R.D.H. Koesoemahatmadja. 1975. *Pengantar Hukum Tata Usaha Indonesia*. Penerbit Alumni. Bandung.

Ridwan HR.2006.*Hukum Administrasi Negara*.Grafindo.Jakarta.

SF.Marbun,SH. *Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara*. Liberty.Yogyakarta.

Philipus M Hadjon dkk. 1993. *Pengantar Hukum Amnistrasi Indonesia*. Gajah mada university press.Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki.*Law Indonesia*. Hal 141

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/113/KPTS/013/2012 Tentang Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Antara Kabupaten Blitar Dan Kabupaten Kediri.

Hasil wawancara

Hasil Wawancara Dengan Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Blitar

Internet

Profil Kabupaten Blitar (online). 2012. www.blitarkab.go.id (19 November 2012)

Muhammad Ikhwan, 2010, Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) (online), www.studihukum.com (21 desember2012)

Informasi mengenai Gunung Kelud (Online).2012.www.id.wikipedia.org (19 November 2012)

Informasi mengenai Logo (Online). 2011. www.allaboutlogo.com (19 November 2012)

Profil daerah Kabupaten Blitar 2012
(online).www.regionalinvestment.bkpm.go.id 19 November 2012

Soal penegasan batas wilayah Gunung Kelud (online). [www. tempointeraktif.com](http://www.tempointeraktif.com)
(14 Desember 2012)